

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG, KECAMATAN TEMBALANG KELURAHAN JANGLI DAN *WEBSITE* KELURAHAN JANGLI

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

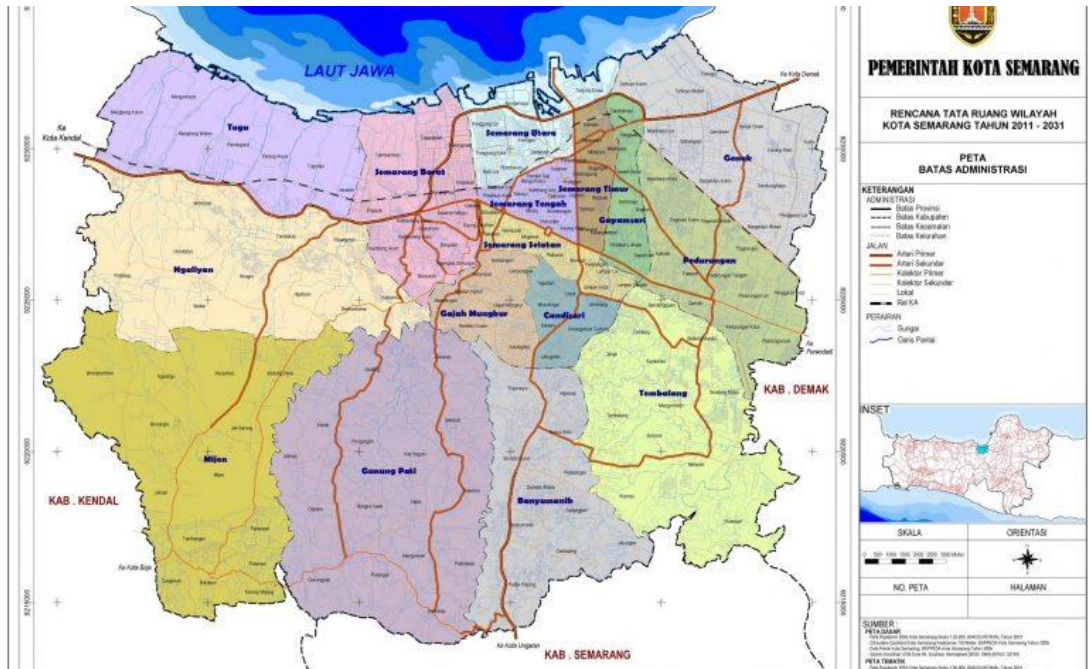
2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang yang merupakan Ibukota dari Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 373,70 Km² . Secara administrative Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan tersebut Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati dengan luas masing-masing wilayah yakni 57,55 Km² dan 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang dimana wilayah di bagian tersebut merupakan wilayah perbukitan yang memiliki potensi di bidang pertanian dan perkebunan. Sedangkan 2 Kecamatan yang memiliki wilayah terkecil yakni Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Semarang Selatan dengan masing-masing luas wilayahnya yakni 6,14 Km² dan 5,93 Km². Kota Semarang memiliki batas wilayah administratif yakni pada bagian barat adalah Kabupaten Kendal, berikutnya pada bagian timur yakni Kabupaten Demak, lalu pada bagian selatan dengan kabupaten Semarang dan bagian utara yakni Laut Jawa dengan panjang garis mencapai 13,6 Kilometer. Letak dan kondisi geografis Kota Semarang memiliki posisi

astronomi terletak antara 6 50' – 7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35' – 110 50' Bujur Timur.

Kota Semarang memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh keadaan alamnya, yaitu Kota pegunungan dan kota Pantai. Di daerah pegunungan mempunyai ketinggian 90-359 meter di atas permukaan laut sedangkan di daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75-3,5 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang memiliki posisi yang strategis dalam hal bidang ekonomi dikarenakan Kota Semarang berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan di provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor Pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Kota Semarang juga berperan penting pada sektor transportasi yang mana Kota Semarang yang merupakan simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Maka dari itu Kota Semarang memiliki peran baik bagi transportasi darat (jalur kereta api dan jalan), udara dan juga lautan. Batas wilayah secara administrasi dapat disimak pada gambar 2.1

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber: _Dinas Tata Ruang Kota Semarang

2.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan dokumen Kota Semarang Dalam Angka 2023, Kota Semarang memiliki proyeksi jumlah penduduk yakni 1.659.975 jiwa. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 1.656.564 jiwa. Disampaikan pula pada dokumen tersebut yakni meningkatnya kepadatan penduduk seiring dengan naiknya jumlah penduduk yakni 4.441 jiwa/km². Berdasarkan data, persebaran penduduk di Kota Semarang di tiap-tiap kecamatan masih belum merata. Tercatat, kecamatan Semarang Timur sebagai kecamatan terpadat dengan jumlah 12.067 penduduk per km². Sedangkan

kecamatan Tugu sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk yang paling rendah yakni 1.176 penduduk per Km².

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk per (Km²)
1.	Mijen	85.818	1.518,28
2.	Gunungpati	98.674	1.693,34
3.	Banyumanik	141.319	4.751,45
4.	Gajah Mungkur	55.490	5.938,69
5.	Semarang Selatan	61.212	10.294,11
6.	Candisari	74.461	11.639,84
7.	Tembalang	193.480	4.902,02
8.	Pedurungan	193.125	9.148,66
9.	Genuk	128.696	4.953,84
10.	Gayamsari	69.334	11.147,11
11.	Semarang Timur	65.427	12.067,24
12.	Semarang Utara	116.054	10.186,71
13.	Semarang Tengah	54.338	10.502,98
14.	Semarang Barat	146.915	6.777,58
15.	Tugu	33.079	1.176,14

16.	Ngaliyan	142.553	3.316,14
Kota Semarang		1.659.975	4.441,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

2.1.3 Kondisi *E-Government* di Kota Semarang

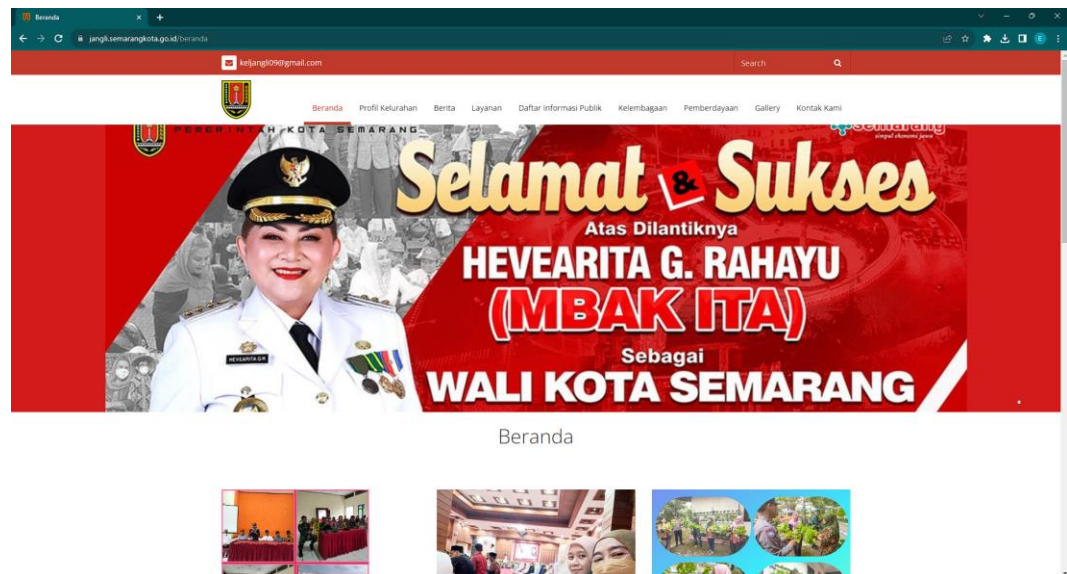
Berdasarkan kondisi geografis dan demografis diatas penerapan *e-government* di Kota Semarang menjadi penting untuk melakukan pelayanan efektif dan efisien. Kota Semarang memiliki salah satu motto yakni “be smart city (berdasarkan *E-Government, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparant City*)”. Kota Semarang menunjukkan keseriusan dalam menerapkan *E-Government* untuk mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance. Kerseriusan yakni salah satunya dibuktikan melalui RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kota Semarang tahun 2005-2025, yakni Penguatan Good Governance dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin berkualitas.

Pada tahun 2016 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang terbentuk yang bertujuan khusus untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan di bidang *E-Government* yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bagian PDE Setda Kota Semarang. Peraturan yang menjadi acuan dari pembentukan Diskominfo Kota Semarang adalah Peraturan Walikota Semarang No.76 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

(Diskominfo). Upaya lebih jauh dari pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan *E-Government* secara menyeluruh dalam hal ini yakni di tingkatan kecamatan dan kelurahan dengan menciptakan *website* www.portalkecamatan.semarangkota.go.id. *Website* yang diluncurkan tersebut berisi tentang data kecamatan dan kelurahan di Kota Semarang. Dalam *website* tersebut pula memuat data profil, kelembagaan, dan layanan publik. Salah satu langkah tersebut yakni untuk mengembangkan penerapan *E-Government* kota semarang dari terpusat menjadi menyeluruh ke pemerintahan tingkat kelurahan.

Gambar 2.2

***Website* Kelurahan Jangli**



Website Kota Semarang dibuat pada tahun 2016, disusul dengan pemekaran *website* kelurahan di Kota Semarang. Salah satunya adalah Kelurahan Jangli, Kelurahan Jangli, Kota Semarang yang juga memiliki *website* jangli.semarangkota.go.id. Dalam *website*

ini peneliti merasa *website* sendiri masih kurang dimanfaatkan, fungsi *website* yang dimiliki masih dirasa sederhana, dan belum terintegrasi untuk memberikan layanan online. Informasi tata cara pembuatan KTP dan KK hanya ada di *website*. Selanjutnya ada halaman di *website* yang kosong dan tidak berfungsi. Menurut peneliti, Pemerintah Kelurahan Jangli menyia-nyiakan fasilitas yang dibangun untuk kebutuhan masyarakat. Dalam struktur yang disediakan oleh halaman situs web, tidak ada staff pada departemen IT, atau dalam hal ini, tidak ada orang yang berdedikasi pada pengembangan elektronik.

2.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Menurut Peraturan Wali Kota Semarang No. 90 Tahun 2016, Kelurahan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.2.1 Kedudukan Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

1. Lurah;
2. Sekretariat;
3. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Jabatan Fungsional

2.2.2 Tugas dan Fungsi Kelurahan

1. Lurah
 - a. Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Tugas Lurah ialah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik area dan kebutuhan Daerah kabupaten serta melaksanakan

Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah setempat.

- b. Istilah Lurah sering kali rancu dengan jabatan Kepala Desa. Memang, di Jawa pada umumnya, secara historis pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah Lurah. Namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia, sebuah Kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedang Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduanya berbeda, karena Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat; sedang Kepala Desa bisa dijabat oleh siapa saja yang memenuhi syarat, dan dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) seperti yang di berlakukan sekarang secara nasional.
- c. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, lurah dalam kelurahan berbeda dengan kalurahan. Lurah dalam kalurahan dipilih melalui pemilihan lurah, dan memiliki tugas yang sama dengan kepala desa secara umum. Sebagai pimpinan kelurahan, lurah bertanggungjawab melakukan seluruh perencanaan program, kegiatan dan anggaran kelurahan. Lurah juga menyusun sistem pelayanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi untuk kelurahan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekretaris merupakan

tangan kanan dari lurah dalam hal ini dapat membantu kegiatan apabila lurah tersebut tidak dapat menghadiri kegiatan. Sebagai sekretaris juga melakukan pembagian tugas kepada seluruh seksi-seksi yang ada. Sekretaris dapat dibantu satu hingga dua orang staff untuk membantu keberjalanan kegiatan kesekretariatan. Sekretaris kelurahan juga wajib menyediakan kebutuhan-kebutuhan di kantor seperti alat tulis, barang milik daerah, air, listrik hingga komunikasi.

3. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan

Seksi Pemerintahan dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan memiliki tugas merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi program kerja di sektor pembangunan di wilayah kelurahan tersebut. Seksi ini juga bertanggung jawab menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan melakukan pembinaan pada sektor pembangunan di bidang industri, perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha menengah(UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. Seksi Kesejahteraan Sosial memiliki tugas merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi program kerja di sektor kesejahteraan sosial. Seksi ini bertanggungjawab untuk menyiapkan dan juga memfasilitasi kegiatan seperti fasilitasi PKK, program peningkatan pengarusutamaan gender, UMKM, dan Karang Taruna. Seksi ini juga bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan kerukunan hidup antar umat beragama, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja di sektor ketentraman dan ketertiban umum. Salah satu tugas dari seksi ini ialah menyiapkan kegiatan program pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa. Berikutnya seksi ini juga bertanggung jawab untuk menyiapkan kegiatan

pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahan tersebut. Lalu seksi ini juga bertanggung jawab menyiapkan kegiatan dan melaksanakan menyelenggarakan perlindungan masyarakat di wilayah Kelurahan.

6. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.3 Gambaran Badan Kelurahan Jangli Kota Semarang

2.3.1 Kondisi geografis

Kelurahan Jangli memiliki luas wilayah 207,00 Ha yang terdiri dari 5 Rukun Warga (RW) dan 40 Rukun Tetangga (RT). Batas-batas wilayah di Kelurahan Jangli pada bagian utara yakni Kelurahan Jomblang, bagian Selatan yakni Kelurahan

Tembalang, lalu pada bagian barat yakni Jalan Tol Jangli-Pelabuhan dan yang terakhir pada bagian Timur yakni Kelurahan Sambiroto-Mangunharjo

2.3.2 Kondisi demografis

Kelurahan Jangli memiliki jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2021 sebanyak 6.458 yang terdiri dari 1653 Kepala Keluarga. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki adalah 3.257 orang dan jumlah penduduk perempuan yakni 3201 orang. Mayoritas pekerjaan masyarakat Kelurahan Jangli yakni buruh industri dan bangunan yang berjumlah 849 orang. Berikutnya mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Jangli yakni beragama Islam yakni sejumlah 5638 orang, disusul dengan agama Katholik dengan jumlah 413 orang, Kristen Protestan 374 orang, Hindu 13 orang dan Buddha 11 orang.

Adapun Struktur Pemerintahan Kelurahan Jangli disajikan dalam bagan berikut:

